

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Indeks harga konsumen atau inflasi kabupaten Ponorogo mengikuti inflasi kota Madiun, karena berada dalam satu kawasan wilayah proxy perekonomian. dimana pada bulan September 2024, inflasi year on year (y-on-y) kota Madiun sebesar 1,22 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 105,03.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu :

- a. kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau sebesar 2,07%
- b. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0.73%
- c. Kelompok kesehatan sebesar 0,94%
- d. Kelompok transportasi sebesar 1,27%
- e. Kelompok pendidikan sebesar 1,66%
- f. kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 2,01% dan
- g. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,59%

sementara terdapat empat kelompok yang mengalami penurunan indeks, yaitu:

- a. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,09%
- b. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,43%
- c. Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,12%; dan
- d. Rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,01%

disisi lain, tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) kota Madiun bulan September 2024 masing-masing sebesar -0,14% dan 0,38%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dan dapat mempengaruhi inflasi di kabupaten ponorogo khususnya di sepanjang Triwulan III 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Ada peningkatan harga pada komoditas cabai rawit hal ini disebabkan oleh adanya beberapa sentra produksi cabai yang gagal panen akibat kekurangan air selain itu faktor mekanisme pasar;
- b. Pada evaluasi minggu ke 4 bulan Juli, Kabupaten ponorogo termasuk dalam 10 kabupaten/kota di Jawa dengan kenaikan IPH tertinggi (urutan ke -10, dengan nilai indeks 0,67%). Dengan andil komoditas yang memengaruhi adalah komoditas cabai rawit, daging

ayam ras dan udang basah.

Meskipun demikian, tekanan kenaikan harga diperkirakan dapat tertahan oleh beberapa faktor berikut:

1. Terjaganya ekspektasi masyarakat.
2. Terjaganya distribusi.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di kabupaten Ponorogo dilaksanakan secara sistematis dan dinamis dengan memperhatikan perkembangan berbagai kondisi dan indikator terkini dilapangan. sepanjang Triwulan III 2024, pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan beberapa kebijakan, meliputi:

- a. Penguatan kelembagaan TPID melalui rapat koordinasi;
 - b. Melakukan monitoring melalui monitoring harga ke pasar baik tradisisonal dan ritel modern serta pengecekan stok di gudang beras bulog;
 - c. Melakukan pemantauan harga melalui aplikasi sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok (siskaperbapo);
 - d. Memberikan bantuan transportasi angkutan cerdas sekolah (ACS)
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo turut berperan besar dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Ponorogo. Beberapa program dan kebijakan Kabupaten Ponorogo yang efektif dalam menjaga dan mengendalikan inflasi terutama di Triwulan III 2024 adalah sebagai berikut :

- Pemantauan harga dan kecukupan pasokan/sidak komoditas secara langsung ke sejumlah pasar, pedagang, distributor dan toko ritel
- Analisa/evaluasi laporan siskaperbapo (sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok)
- Membuka warung jaga stabilitas inflasi pangan, gerakan pangan murah (JATILAN GPM) di pasar songgolangit: dan
- Rapat intern anggota TPID Kabupaten Ponorogo

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sehubungan dengan kendala yang terjadi di Triwulan III 2024 dalam upaya pengendalian daerah inflasi di Kabupaten Ponorogo, TPID Kabupaten Ponorogo merekomendasikan beberapa hal dalam perumusan (4K) kebijakan pengendalian inflasi, diantaranya :

1. Keterjangkauan harga

- Mengadakan gerakan pasar murah yang berkerja sama dengan perum bulog dan dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
- Mengadakan kegiatan operasi pasar murah yang berkerjasama dengan perum bulog dengan dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro
- Membuka warung JATILAN (jaga stabilitas harga pangan) di pasar legi

2. Ketersediaan pasokan

Secara terus menerus memantau perkembangan harga dan kelancaran pasokan serta ketersediaan stok komoditas pokok khususnya cabai rawit, beras, minyak goreng, telur, dan daging ayam ras. pemantauan dilaksanakan dengan kunjungan langsung ke pasar, gudang dan distributor atau secara offsite yaitu melalui aplikasi siskaperbapo.

3. Kelancaran distribusi

adanya kondisi kelangkaan stok komoditas tertentu di Kabupaten Ponorogo yang di akibatkan jenis komoditas tersebut tidak dapat dihasilkan di wilayah sendiri, membuka ruang di perlukan adanya KAD (Kerja sama antar daerah) dengan daerah lain yang berposisi sebagai daerah penghasil. hal tersebut akan dimulai dengan pemetaan jenis komoditas tersebut untuk dapat dikerja samakan dalam pemenuhan ketersediaan stok.

4. Komunikasi Efektif

- Meningkatkan koordinasi anggota TPID Kabupaten Ponorogo.
- Mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah dengan pemerintah pusat yang dihadiri oleh anggota TPID dan Forkompimda
- Memasang daftar harga di pasar legi
- Menghadiri HLM yang diadakan oleh provinsi Jawa Timur; dan
- mengadakan HLM dengan anggota TPID Kabupaten Ponorogo.